BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu media informasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk membantu para manajer dan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Pada saat menilai perusahaan, investor membutuhkan informasi-informasi sebenarnya yang tersaji dalam laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang berguna maka diperlukan metode akuntansi yang tepat, akurat serta relevan pada saat diungkapkan, sampai pada tahap penyajian di laporan posisi keuangan perusahaan. Sehingga dapat membantu manajemen perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Pemilihan metode akuntansi yang tepat, akurat serta relevan sangat diperlukan dalam proses penyajian laporan keuangan apakah telah diperlakukan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku yaitu PSAK.

DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) pada IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah menerbitkan PSAK 16 tentang aset tetap sejak proses konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) pada tahun 2012. Salah satu dampak dari konvergensi ini menyebabkan terjadinya perubahan pada PSAK 16, diantaranya adalah perbedaan pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. Sebelum diterbitkannya PSAK 16 tahun 2012, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan. Setelah konvergensi IFRS standar akuntansi di Indonesia mengizinkan perusahaan boleh memilih salah satu dari dua model pengukuran aset tetap, yaitu model biaya historis atau model revaluasi. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 29 (PSAK 16, 2017) yang menyatakan bahwa pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap, entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

Beberapa tahun belakangan ini, revaluasi aset tetap sudah mulai diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Alasan perusahaan yang memilih menggunakan model revaluasi walaupun harus mengeluarkan biaya yang lebih besar adalah karena perusahaan-perusahaan tersebut mempertimbangkan beberapa keunggulan yang dimiliki model revaluasi (*fair value*), yaitu laporan keuangan menjadi lebih relevan untuk dasar pengambilan keputusan; meningkatkan keterbandingan laporan keuangan; dan informasi lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, potensi laba/rugi sebuah perusahaan dapat diprediksi jauh-jauh hari. Selain itu, model revaluasi juga dapat menguntungkan perekonomian Indonesia karena jika menggunakan model biaya historis, aset-aset perekonomian nasional dinilai jauh lebih rendah dari nilai wajarnya (Sukiati & Pertami, 2017).

Namun, masih banyak juga perusahaan di Indonesia memilih untuk menggunakan model biaya historis dikarenakan model revaluasi (*fair value*) juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu kemungkinan nilai yang ada di pasar tidak menunjukkan nilai wajar karena pasar dianggap tidak atau kurang aktif; ketiadaan informasi sebagai acuan resmi bagi setiap orang untuk mengakses dan mengetahui informasi dan perkembangan harga pasar. Selain itu, jika perusahaan menggunakan model revaluasi, maka perusahaan harus menggunakan jasa penilai (*assessor*) karena banyaknya aset tetap yang tidak memiliki nilai pasar. Hal ini banyak dihindari oleh perusahaan agar tidak mengeluarkan biaya pajak yang lebih besar (Sukiati & Pertami, 2017).

Meskipun dengan menggunakan model revaluasi perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih relevan mengenai laporan posisi keuangan perusahaannya, di beberapa negara yang memperbolehkan model revaluasi, keputusan untuk menggunakan model revaluasi itu sendiri masih ditentukan oleh kebijaksanaan manajer. Ketidakkonsistenan yang cukup antara waktu, frekuensi, dan metode praktik revaluasi menimbulkan pertanyaan mengenai apakah “relevansi” adalah satu-satunya alasan mengenai revaluasi aset perusahaan. Teori akuntansi positif mengemukakan bahwa pilihan manajer terhadap metode akuntansi dapat dipengaruhi oleh dorongan ekonomi (Seng & Su, 2010).

Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap suatu perusahaan. PSAK 16 menyatakan bahwa apabila perusahaan memilih model revaluasi aset tetap maka perubahan kebijakan pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap tersebut harus dilakukan konsisten terus menerus, artinya sekali perusahaan memilih model revaluasi aset tetap maka perusahaan tersebut tidak bisa kembali ke model biaya historis. Dengan asumsi bahwa informasi nilai wajar lebih relevan dibanding dengan informasi biaya historis. Revaluasi aset tetap dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan perusahaan menanamkan sumber eksternal atau tambahan modal pinjaman dari kreditur, kemudahan perusahaan dalam menambah sumber modal pinjaman tidak terlepas adanya perjanjian *debt contract* atau biaya kontrak hutang antara perusahaan dengan kreditur.

Motif manajemen perusahaan dalam memilih model revaluasi aset tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah biaya kontrak, biaya politik, dan asimetri informasi. Biaya kontrak merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi manajer dalam memilih model/kebijakan pengukuran aset tetapnya. Biaya kontrak hutang muncul karena adanya perjanjian antara perusahaan dengan kreditur. Perusahaan yang mempunyai kontrak hutang lebih tinggi memungkinkan manajer menggunakan prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau aset perusahaan (Scott, 2009). Perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi karena mengharapkan nilai aset perusahaan yang akan meningkat ketika dilakukannya revaluasi aset tetap, oleh karena itu perusahaan yang mempunyai kontrak hutang lebih tinggi cenderung untuk melakukan revaluasi aset tetap yang diharapkan dapat meningkatkan nilai aset perusahaan. Seng dan Su (2010) menyatakan bahwa biaya kontrak dapat diukur dengan menggunakan tingkat *leverage*, karena metode pengukuran aset tetap dalam hal ini adalah metode revaluasi maka akan dapat mempengaruhi perusahaan saat bernegosiasi tentang kontrak hutang dengan para pemegang hutang.

Biaya politik muncul karena adanya fenomena bahwa perusahaan-perusahaan dengan ukuran, pangsa pasar, dan laba yang sangat besar akan memperoleh perhatian yang besar dari publik. Perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya dituntut untuk memenuhi kinerja operasi dan kinerja lingkungan yang

tinggi, serta rentan terhadap kenaikan pajak atau tuntutan lainnya. Selain itu, biaya politik dapat dipengaruhi oleh politisi dengan cara menggunakan kebijakan distribusi kekayaan seperti bantuan, jaminan, dan asuransi (Sukiati & Pertamina, 2017). Watts & Zimmerman (1986) dalam *political cost hypothesis* yang merupakan bagian dari teori akuntansi positif menyatakan bahwa ukuran perusahaan digunakan sebagai pedoman biaya politik dan biaya politik akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran dan risiko perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar akan lebih sensitif secara politis dan memiliki beban transfer kesejahteraan (biaya politik) lebih besar yang dikenakan pada mereka daripada perusahaan-perusahaan kecil. Maka dari itu, terkait dengan biaya politik, ukuran perusahaan yang besar relatif untuk mengurangi laba mereka agar biaya politik perusahaan berkurang. Oleh sebab itu untuk menurunkan tekanan politik baik dari pemerintah atau publik tersebut revaluasi aset tetap merupakan cara efektif dalam menurunkan atau mengurangi pelaporan laba yang besar melalui peningkatan biaya depresiasi sebagai akibat peningkatan revaluasi aset (Seng & Su, 2010).

Fixed asset intensity (intensitas aset tetap) merupakan salah satu faktor yang diuji terkait dengan informasi asimetri (Seng & Su, 2010). Intensitas aset tetap digunakan untuk mengukur informasi asimetri. Informasi asimetri terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi yang lebih dibandingkan pihak lainnya (Latifa & Haridhi, 2016). Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang besar akan cenderung semakin besar kemungkinannya untuk memilih model revaluasi pada pencatatan aset tetap mereka (Manihuruk & Farahmita, 2015). Hal ini dikarenakan aset tetap merupakan komposisi terbesar yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Permasalahan yang terkait dengan revaluasi aset tetap terjadi di PT. Semen Indonesia Tbk (SMGR). Perusahaan tersebut belum tertarik melakukan revaluasi aset, meskipun pemerintah sudah menawarkan diskon pajak penghasilan (pph) atas aset yang akan direvaluasi. Menurut Suparni selaku Direktur Utama Semen Indonesia 2015 mengatakan bahwa, perusahaan masih memiliki kemampuan dari keuangan internal dan mengandalkan sumber pembiayaan dari perbankan, sehingga perusahaan belum perlu untuk melakukan revaluasi aset. Padahal total

aset PT. Semen Indonesia Tbk berupa tanah dan bangunan mencapai Rp. 20 triliun. Meskipun, revaluasi aset tetap ke depan bisa menaikkan nilai aset perusahaan dan bisa membuat pinjaman bisa dapat lebih banyak dan pengembangan lebih cepat. (Sutianto, 2015)

Permasalahan yang terjadi di PT. Semen Indonesia Tbk tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan, yaitu pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid V pada tanggal 22 Oktober 2015 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.191/PMK.010/2015. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut setiap perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap dan mendapatkan surplus atas revaluasi aset maka perusahaan akan diberikan penurunan tarif PPh final sebesar 3% jika dilakukan sampai dengan 31 Desember 2015, 4% sampai dengan 30 Juni 2016 dan 6% sampai dengan 31 Desember 2016.

Dengan adanya PMK No.191/PMK.010/2015 diharapkan perusahaan dapat lebih tertarik dalam melakukan revaluasi aset tetapnya secara konsisten dan berkala sesuai periode yang berlaku, karena ketika perusahaan melakukan revaluasi aset maka akan berdampak positif dalam performa finansial perusahaan.

Beberapa penelitian mengenai Revaluasi Aset Tetap telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang diantaranya yang diteliti oleh Seng & Su (2010), Latridis & Kilirgiotis (2012), Sudrajat, dkk (2016), Aziz & Yuyetta (2017) mengemukakan bahwa Biaya Kontrak, Biaya Politik dan *Fixed Asset Intensity* mempunyai pengaruh signifikan terhadap Revaluasi Aset Tetap.

Sementara dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Barac & Sodan (2011), Yulistia, dkk (2015), Sudrajat, dkk (2016), Sukiati & Pertamina (2017) menunjukkan bahwa Biaya Kontrak, Biaya Politik dan *Fixed Asset Intensity* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Revaluasi Aset Tetap.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Barac & Sodan (2011) dengan judul *Motives For Asset Revaluation Policy Choice In Croatia* dengan menggunakan variabel *Operating Income to Interest Cost Ratio*, *Cash flow Ratios*, *Liquidity*, *Fixed asset intensity*, *Size and Return on Equity* . Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel yaitu Biaya Kontrak, Biaya Politik, dan *Fixed Asset*

Intensity , populasi penelitian ini yaitu perusahaan dibidang sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian tersebut masih ada ketidak konsistenan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu dan berdasarkan fenomena yang terjadi. Sehingga timbul keinginan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi revaluasi aset tetap. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengujian kembali mengenai pengaruh biaya kontrak, biaya politik, dan *fixed asset intensity* terhadap revaluasi aset tetap dengan mengangkat judul: “Motif Manajemen Dalam Melakukan Revaluasi Aset Tetap”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah Biaya Kontrak berpengaruh terhadap Revaluasi Aset Tetap?
- b. Apakah Biaya Politik berpengaruh terhadap Revaluasi Aset Tetap?
- c. Apakah *Fixed Asset Intensity* berpengaruh terhadap Revaluasi Aset Tetap?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan secara empiris Biaya Kontrak memiliki pengaruh terhadap Revaluasi Aset Tetap.
- b. Untuk membuktikan secara empiris Biaya Politik memiliki pengaruh terhadap Revaluasi Aset Tetap.
- c. Untuk membuktikan secara empiris *Fixed Asset Intensity* memiliki pengaruh terhadap Revaluasi Aset Tetap.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai variabel-variabel yang terkait.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan maupun langkah stratejik perusahaan sehubungan dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan Revaluasi Aset Tetap.

2. Bagi Investor

Dapat digunakan oleh investor sebagai sumber pemikiran dalam membuat keputusan dan untuk mengetahui kondisi perusahaan sebagai acuan untuk memilih perusahaan mana yang akan dijadikan investasinya.